



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.
- b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- b. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd
Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 27



Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan; 1). Pada masa pandemi kegiatan pelayan KB bergerak/ Safari untuk peserta Non BPJS dibatasi sehingga turunnya jumlah akseptor KB; 2). Pada masa pandemi calon akseptor enggan untuk mengakses faskes karena takut tertular Covid-19.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) pada tahun 2021 semakin naik dikarenakan: 1). Pada masa pandemi, kegiatan Pelayan KB bergerak/Safari untuk peserta Non BPJS dibatasi sehingga turunnya jumlah Akseptor KB; 2). Pada masa pandemi, calon akseptor peserta BPJS enggan untuk mengakses faskes karena takut tertular Covid-19; 3). Pelayanan KB MKJP pada masa pandemi memerlukan biaya lebih tinggi karena calon akseptor harus dilakukan Rapid Test terlebih dahulu dan Nakes harus menggunakan APD Level 1. Untuk Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) bersifat tetap yaitu terdapat 1 orang PPKB di setiap desa.

2.3.2.5. Bidang Komunikasi dan Informatika

Saat ini komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana/ prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual, serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Berdasarkan amanat peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki 1 website utama yaitu www.klatenkab.go.id. Namun keberadaan website tersebut masih perlu terus ditingkatkan, karena kurangnya informasi yang disampaikan di website tersebut. Hal itu disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dan bidang komunikasi dan informasi. Capaian indikator Urusan Komunikasi dan Informatika selama tahun 2020 s/d 2021 bersifat tetap, antara lain: Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan tercatat sebesar 75 %; cakupan layanan komunikasi 56,5 %. Capaian indikator Kinerja Program Diskominfo tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	-	61,5	73	75	75
Cakupan layanan telekomunikasi	%	-	52,2	53,6	56,5	56,5

Sumber: Diskominfo Kabupaten Klaten, 2022

2.3.2.6. Koperasi

Koperasi merupakan bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten, mengingat posisi dan manfaatnya yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Perkembangan koperasi aktif mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, dari 581 koperasi aktif di tahun 2017 meningkat menjadi 717 koperasi ditahun 2020, kemudian pada masa Pandemi Covid-19 menurun menjadi 494 koperasi ditahun 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah koperasi sehat yang justru mengalami peningkatan dari 14 koperasi sehat di tahun 2017, meningkat menjadi 16 koperasi sehat ditahun 2021. Berikut data perkembangan perkoperasian Tahun 2017-2021

Tabel 2.89
Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten
Tahun 2017-2021

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Koperasi	883	886	889	893	898
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	581	710	713	717	494
4	Koperasi Tidak Aktif	302	176	176	176	404
5	Koperasi Sehat	14	8	13	15	16
6	Koperasi Cukup Sehat	567	347	346	352	335

Sumber: Dinas Dagkop & UMKM dan Disperinaker Kabupaten Klaten, 2022

2.3.2.7. Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM mikro selama kurun waktu tahun 2017 s/d 2021 mengalami kenaikan, dari 34.680 unit ditahun 2017 menjadi 50.125 unit ditahun 2021. Untuk UMKM kecil juga mengalami peningkatan, hal ini selaras dengan jumlah UMKM mikro yang juga meningkat dari 135 unit di tahun 2017 meningkat menjadi 5.030 ditahun 2021. Salah satu factor yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah dilaksanakannya kegiatan pendataan ulang pada tahun 2019 yang memunculkan data *by name by address* untuk masing-masing pelaku usaha. Adanya Pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir justru meningkatkan jumlah masyarakat yang berusaha, baik skala mikro maupun kecil.



banyak tenaga kerja yang dibutuhkan begitu juga untuk sebaliknya ada masa sepi pesanan sehingga harus menghentikan tenaga kerja.

Pemrintah Kabupaten Klaten telah menetapkan 7 (tujuh) produk unggulan daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 050/84 Tahun 2016 yaitu Batik, Lurik, Konveksi, Mebel, Logam, Keramik dan Tembakau. Di samping itu, Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) Klaster UKM yaitu Klaster Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Mebel, Logam, Handycraft, Makanan Olahan, Lereng Merapi, Desa Wisata dan Minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017.

Pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi trademark dan *brand image* bagi Kabupaten Klaten. Pandemi Covid-19 selama ini telah mengakibatkan pelaku usaha maupun lembaga koperasi mengalami kemunduran baik penyediaan bahan baku, modal, tenaga kerja maupun produksinya serta penurunan omset penjualan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya pelatihan untuk klaster UMKM, penguatan kelembagaan, fasilitasi bantuan bahan baku, peralatan maupun modal usaha, fasilitasi PIRT, label halal dan HAKI serta fasilitasi insentif berupa pengurangan atau penundaan pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) .

2.3.2.8. Bidang Statistik

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Kualitas data diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: akurat, relevan, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), koheren (*coherence*) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial serta mudah diinterpretasi (*interpretability*). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dan informasi, Pemerintah Kabupaten Klaten bekerjasama dengan BPS menerbitkan dokumen Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Input-Output, Profil Desa, Profil



Daerah, Evaluasi RKPD, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Semua dokumen ini dimaksudkan sebagai ukuran kinerja daerah untuk setiap tahunnya yang sudah tercapai 100 %.

Tabel 2.91
Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase dokumen data statistik yang tersedia	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Klaten, 2022

2.3.2.9. Bidang Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2021 sejumlah 11.811 orang, kondisi ini menurun dibanding dengan tahun-sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Layanan Perpustakaan keliling berhenti operasional dikarenakan pembelajaran dengan system daring pada sekolahan serta tidak diadakan *car free day*. Pelayanan perpustakaan umum daerah tetap dilaksanakan dengan sistem buka tutup dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten berinisiatif tetap melakukan pelayanan perpustakaan dengan beberapa inovasi-inovasi antara lain :

1. Layanan pinjam perpustakaan online yaitu dengan iKlaten;
2. Jambu Carlin (Pinjam buku secara Online);
3. Pojok Baca Digital (POCADI).

Jumlah dan koleksi buku perpustakaan tahun 2021 sampai dengan sebanyak 50.156 eksemplar, mendapat penambahan 370 eksemplar dengan rincian sebagai berikut :

1. 60 eksemplar dari pengadaan kegiatan tahun 2021
2. 300 eksemplar (di POCADI) bantuan dari Perpustakaan Nasional dan
3. 10 eksemplar bantuan dari Kementerian Pertanian.

Jumlah koleksi judul buku sampai dengan saat ini sebanyak 37.673 eksemplar, untuk jumlah pustakawan pada tahun 2021 baru 2 (dua) orang fungsional pustakawan dan 2 (dua) orang CASN pustakawan. Berikut data capaian indikator perpustakaan Tahun 2017-2021.

Tabel 2.92
Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang/ Pengunjung	41.225	68.346	83.511	70.878	11.811



Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Tahun 2021	Status	OPD
	2)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata kader Lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	-	100	85,50	85,50	▼	Dinas Permasdes
7.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1)	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,96	0,9	-4,12	657,78	●	DissosPPPAKB
	2)	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	%	-	70	70,30	100,43	●	DissosPPPAKB
	3)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga pra sejahtera	%	-	28	N/A	N/A	N/A	DissosPPPAKB
8.	Urusan Perhubungan									
	1)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	-	57,52	87,01	151,27	●	Dinas Perhubungan
	2)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah titik penerangan jalan umum terpasang	titik	-	250	468	187,20	●	DPUPR
9.	Urusan Komunikasi dan Informatika									
	1)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Sampai Ke Publik	%	-	56,5	255	451	●	Dinas Kominfo
	2)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	%	-	80	99	124	●	Dinas Kominfo
10.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									



Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Tahun 2021	Status	OPD	
	1)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	80,97	70	39,74	56,77	▼	Dinas Dagkop UKM
			Persentase pertumbuhan koperasi	%	0,45	0,45	0,14	31,11	▼	Dinas Dagkop UKM
	2)	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan HALAL	%	0,647	0,647	0,16	24,73	▼	Dinas Dagkop UKM
	3)	Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0,5	0,5	0,1	20	▼	Dinas Dagkop UKM
11	Usuran Penanaman Modal									
	1)	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan promosi dan investasi	%	-	80	94	117,5	●	DPMPTSP
	2)	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data perizinan terlaksana	%	-	80	81	101,25	●	DPMPTSP
	3)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan penanaman modal terlaksana	%	-	80	80	100	●	DPMPTSP
	4)	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	-	80	66	82,50	▼	DPMPTSP
12	Usuran Kepemudaan dan Olahraga									
	1)	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Prosentase meningkatnya hasil pembinaan kepemudaan	%	-	5	5	100	●	Dinas Parbudpora
	2)	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Prosentase meningkatnya hasil pengembangan dan pembinaan olahraga	%	-	10	10	100	●	Dinas Parbudpora
13	Usuran Statistik									
	1)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Data Statistik Dinas Komunikasi Informatika Yang Tersedia	%	-	100	100	100	●	Dinas Kominfo
14	Usuran Persandian									



Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Tahun 2021	Status	OPD
	1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Persandian Yang Terimplementasi	%	-	27	121	448	●	Dinas Kominfo
15	Urusan Kebudayaan								
	1) Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan	%	-	100	100	100	●	Dinas Parbudpora
	2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	-	100	100	100	●	Dinas Parbudpora
16	Urusan Perpustakaan								
	1) Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	24	1	-83	(8334)	▼	Dinas Arpus
17	Urusan Arsip								
	1) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip	%	18	3	1,68	56	▼	Dinas Arpus
	2) Program Pengelolaan Arsip	Prosentase Peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	%	18	5	5	100	●	Dinas Arpus
C.	URUSAN PILIHAN								
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan								
	1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	-	28.315	30109,31	106	●	DPKPP
	2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	-	537	311,82	58	▼	DPKPP
	3) Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	(kg/ka pita/ta hun)	-	20,41	20,28	99	●	DPKPP
2.	Urusan Pariwisata								
	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase meningkatnya produktifitas nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata	%	-	16	16	100	●	Dinas Parbudpora
	2) Program Pemasaran Pariwisata	Prosentase meningkatnya kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan	%	-	5	5	100	●	Dinas Parbudpora



- b. Belum semua OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Data yang ada menunjukkan 7 OPD (13,73%) yang melaksanakan Kerjasama dan mendapatkan hak akses dengan persetujuan Dirjen Dukcapil.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

- a. Perlu peningkatan kemudahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan optimalisasi sistem pelayanan online.
- b. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- c. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

7. Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C, kondisi terminal yang dikeloladi tahun 2021 rata-rata sebesar 75-80%;
- b. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari capaian rambu lalu lintas biasa yang terpasang baru 86,33 % dari total kebutuhan; traffic light baru 31 unit yang terpasang (77,50 %) dari total kebutuhan; rambu RPPJ terpasang 140 unit dari 200 unit kebutuhan; rambu tipe F terpasang 43 unit (43 %) dari 100 unit kebutuhan yang harus terpasang;

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan perhubungan diantaranya:

- a. Peningkatan terminal type C menuju kondisi baik;
- b. Optimilisasi pemasangan perlengkapan jalan (marka jalan, APILL, rambu, guadril, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum);
- c. Peningkatan jumlah Traffic Light ATCS yang telah terkoneksi dengan CCRoom.

8. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Perlu Optimalisasi Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan website Kabupaten Klaten, sehingga ketersediaan data lebih lengkap dan terupdate secara berkala;
- b. Belum optimalnya utilisasi jaringan *mobile broadband*, dilihat dari cakupan telekomunikasi di tahun 2021 masih sebesar 56,5%;



- c. Belum optimalnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, baru 75 % ditahun 2021;

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki Komunikasi antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Meningkatkan cakupan telekomunikasi;
- c. Melakukan inisiasi,mpembinaan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan.

9. Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya jumlah investor berskala nasional (PMDN) terlihat pada tahun 2021 sebanyak 3.984, salah satunya dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya;
- b. Kurangnya informasi terkait potensi investasi di Kabupaten Klaten.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Meningkatkan informasi terkait potensi investasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Klaten.

10. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua organisasi kepemudaan aktif, terlihat pada tahun 2021 baru sebesar 81% yang aktif;
- b. Kurangnya peran aktif pemuda terutama dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga, terlihat organisasi kepemudaan yang aktif pada tahun 2021 sebanyak 17 OKP;
- c. Masih Minimnya wirausaha muda di kabupaten Klaten, pada tahun 2021 hanya 20% penduduk usia muda yang berwirausaha
- d. Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih yang bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olah raga, serta kurangnya sarana prasarana olah raga sesuai standar.



- terhadap kelebihan batas muatan dan penataan jalur lalu lintas galian C serta masih kurangnya papan rambu-rambu sebagai penunjuk arah;
- p. Komunikasi dan Informatika, permasalahan terkait sektor ini adalah masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi ke seluruh wilayah kecamatan serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung smart city;
 - q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, masih menghadapi persoalan rendahnya kapasitas pelaku usaha, Kualitas produk, manajerial dan pengelolaan kelembagaan usaha mikro dan kecil, rendahnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing produk usaha kecil dan mikro, dan belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro kecil berbasis klaster dan produk unggulan. Disamping itu dengan terjadinya Pandemi Covid 19 juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan produksi serta pasar dari produk-produk UMKM maupun Koperasi;
 - r. Penanaman Modal menghadapi permasalahan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi guna promosi potensi dan penawaran ber-investasi di daerah maupun masih terbatasnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Klaten serta belum didukung ketersediaan database profil investasi, termasuk ketentuan peraturan tentang kemudahan perijinan dan investasi;
 - s. Kepemudaan dan Olahraga; permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan dan keolahragaan maupun kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar serta belum munculnya cabang-cabang olahraga unggulan, termasuk masih kurangnya keberpihakan dan kepedulian terhadap olahragawan berprestasi;
 - t. Statistik; permasalahan yang dihadapi adalah belum akurat dan terpadunya data dasar statistik dan belum terintegrasinya pengelolaan data spasial serta kualitas pengelolaan data terpadu satu pintu;
 - u. Persandian masih menghadapi permasalahan terbatasnya kapasitas dan jumlah SDM bidang persandian maupun kurangnya sarana dan prasarana pendukung persandian;
 - v. Kebudayaan dihadapkan pada persoalan belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya serta belum berkembangnya atraksi seni budaya dan pemajuan kesenian daerah;
 - w. Perpustakaan masih berkaitan dengan terbatasnya layanan dan sosialisasi, sehingga minat dan tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah tergolong rendah;



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program	Indikator Program	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	65,81 %	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	95,59 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	1,48 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	61,46 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik	62,24 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan	38,61 %	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kecelakaan lalu lintas	0,70 %	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	62,75 %	Dinas Komunikasi dan Informatika



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program	Indikator Program	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Persentase penambahan akses internet di ruang publik	75,00 %	
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	72,22 %	
PN06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	-	PD05 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik	100,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	76,32 %	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase jumlah sampah yang berkurang	28,00 %	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	73,00 %	
				Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	51,00 %	
				Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	62,00 %	



Strategi dan Program Unggulan Daerah	Pelaksana Program
<p>d. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.</p> <p>e. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro. Implementasi strategi ini didukung program unggulan Klaten Subur, Subur singkatan dari Subsidi Bunga Ringan, berarti memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM dengan cara memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 80% dari bunga bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.</p>	
<p>3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:</p> <p>a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak. Strategi ini didukung program beberapa program unggulan, yaitu Klaten Tuntas, Klaten Waras, dan Klaten Mantab. Klaten Waras, Waras berarti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi dan Balita) dan Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain. Klaten Tuntas, Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan.</p> <p>b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan. Strategi ini didukung dengan strategi Klaten Mantap, Mantap berarti Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perhubungan • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Pemerintah Pusat 3. Pemerintah Provinsi 4. Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) • Swadaya Masyarakat 5. Dunia Usaha <ul style="list-style-type: none"> • CSR Perusahaan (BUMN, BUMD dan Swasta)



Strategi dan Program Unggulan Daerah	Pelaksana Program
drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap.	

Sumber: Hasil Analisis, 2022



2. Kerja Bersama Bangun Pariwisata

Pariwisata menjadi sektor unggulan Kabupaten Klaten yang dapat memberikan multiplier effect bagi peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan kunjungan wisata di Kabupaten Klaten karena terpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Tahun 2023 sejalan upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2022 diharapkan mampu pulih Kembali sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB, pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat. Tema yang diangkat pada tahun 2023 dalam pengembangan pariwisata yaitu “**Kerja Bersama Bangun Pariwisata Klaten**”. Tema ini mengandung maksud bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara Bersama-sama terpadu (holistic), terintegrasi antar sektor. Secara spasial pembangunan pariwisata difokuskan pada desa-desa yang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata, dan Kawasan Strategi Pariwisata (KSP) yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten.

Implementasi Kerja Bersama Bangun Pariwisata ini dilakukan dengan strategi dan pihak yang terkait sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Program Kerja Bersama Bangun Pariwisata
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Strategi dan Program Unggulan Daerah	Pelaksana Program
<p>1. Pengembangan destinasi wisata yang berkualitas dan berdaya saing melalui pengembangan Desa Wisata menuju 100 Desa Wisata, dan Fasilitasi dan pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata (KSP). Strategi ini didukung oleh program unggulan Klaten Keren, Keren berarti Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan dan membelanjakan uangnya di Klaten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Katen.</p>	<p>1. Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perhubungan • Dinas Komunikasi dan Informatika • Kecamatan • Pemerintah Desa <p>2. Pemerintah Pusat</p> <p>3. Pemerintah Provinsi</p> <p>4. Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) <p>5. Dunia Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSR Perusahaan (BUMN, BUMD dan Swasta)
<p>2. Pengembangan investasi di bidang pariwisata. Strategi ini didukung program unggulan Klaten Santer, Santer singkatan dari Sahabat Investor, dimana Kabupaten Klaten merupakan wilayah strategis yang berada diantara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang memiliki keunggulan kepariwisataan, pertanian dan zona</p>	<p>1. Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu <p>2. Pemerintah Pusat</p> <p>3. Pemerintah Provinsi</p>



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.894.193.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.380.343.410	Dinas Komunikasi dan Informatika
PN06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		PD05 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.460.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	11.234.788.089	Dinas Lingkungan Hidup



10. Komunikasi dan Informatika

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media surat kabar dan media elektronik (radio dan televisi);
- b. Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui website pemerintah;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 60 sistem informasi untuk memberikan kemudahan akses dan data;
- d. Terlaksananya penanganan pelayanan seluruh pengaduan masyarakat; dan
- e. Meningkatnya kemampuan SDM bidang teknologi informasi.

Target yang ingin dicapai tahun 2023 antara lain Presentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 36,36%, Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat 100%, Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo 62,75%; Persentase penambahan akses internet di ruang publik 75%; dan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 72,22%. Program-program yang akan dilaksanakan pada bidang komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diarahkan pada Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi sebanyak 26,82%; persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi sebanyak 9,30%; persentase koperasi aktif sebesar 71,2%; persentase koperasi yang patuh sebanyak 25,90; persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya sebanyak 17%; persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak 31,6%; Persentase koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan 18,9%; pertumbuhan usaha mikro sebanyak 0,14%; persentase UMKM yang melakukan kemitraan sebanyak 0,32%; dan persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan sebanyak 3,5%.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mengakibatkan pelaku usaha maupun lembaga koperasi mengalami kemunduran baik untuk penyediaan bahan baku, modal, tenaga kerja maupun produksinya, menurunnya omset penjualan. Untuk



14. Statistik

Urusan statistik lebih diprioritaskan untuk memperoleh dokumen statistik. Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standart data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia 40%. Program yang dilaksanakan untuk mendukung target tersebut adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

15. Persandian

Urusan persandian lebih diprioritaskan untuk meningkatkan pengamanan informasi persandian yang terimplemtasi. Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik 38% dan Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/ tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah 39,22% Program yang dilaksanakan untuk mendukung target tersebut adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah dengan target Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan 25%; Persentase Pelaku Seni Tradisional yang kompeten 40%; Persentase Pembinaan Sejarah 35%; dan Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan 17%. Adapun program yang direncanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan;
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- c. Program Pembinaan Sejarah;
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

17. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perpustakaan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan target Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 51.962 eksemplar dan Persentase perpustakaan yang dibina sebesar 22%.

18. Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan diarahkan untuk mencapai target Persentase arsip yang diakuisisi 78%; Persentase pengawasan kearsipan internal 100%; Arsip usul musnah 60 Meter lari dan Persentase arsip yang



5.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Ringkasan pagu indikatif pendanaan program dan kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel bawah ini.

Tabel 5.3.
Ringkasan Pagu Indikatif Pendanaan Program dan Kegiatan
Tahun 2023 Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatof (Rp)	Proporsi (%)
1.	Dinas Pendidikan	985.614.096.612	36,26
2.	Dinas Kesehatan	401.455.255.000	15,04
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	214.304.000.000	7,49
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22.522.530.000	0,79
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.139.843.000	0,30
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.728.625.000	0,28
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	28.657.145.000	1,04
8.	Dinas Lingkungan Hidup	50.269.788.000	1,09
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.983.316.000	0,31
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.531.560.000	0,32
11.	Dinas Perhubungan	8.807.866.000	1,94
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	53.158.905.000	0,39
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	13.216.314.000	0,78
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.153.679.000	0,28
15.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dan Pariwisata	6.835.559.000	0,64
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.090.423.000	0,16
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.354.964.000	1,84
18.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.727.883.000	0,36
	Sekretariat Daerah	54.600.078.008	1,96
19.	Sekretariat DPRD	55.256.584.000	2,02
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.460.205.000	0,30
21.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	655.912.010.000	22,37
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.076.163.000	0,44
23.	Inspektorat	15.774.283.000	0,57
24.	Kecamatan Prambanan	2.777.877.614	0,10
25.	Kecamatan Gantiwarno	2.524.449.000	0,09
26.	Kecamatan Wedi	2.673.607.000	0,10
27.	Kecamatan Bayat	2.604.614.000	0,09
28.	Kecamatan Cawas	2.863.317.000	0,10
29.	Kecamatan Trucuk	2.629.562.000	0,09
30.	Kecamatan Kebonarum	2.329.284.000	0,08
31.	Kecamatan Jogonalan	2.518.096.000	0,09
32.	Kecamatan Manisrenggo	2.689.405.000	0,10
33.	Kecamatan Karangnongko	2.736.148.000	0,10
34.	Kecamatan Ceper	2.665.450.000	0,10



Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target Tahun 2023	Urusan/ OPD Pengampu
32)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,26	Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
15	Urusan Perhubungan			Dinas Perhubungan
33)	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,61	
16	Urusan Komunikasi dan Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika
34)	Indeks SPBE	Indeks	3,4	
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
35)	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	2,24	
18	Urusan Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
36)	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	10	
37)	Persentase peningkatan investasi PMA	%	1	
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
38)	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	40	
20	Urusan Statistik			Dinas Komunikasi dan Informatika
39)	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	40	
21	Urusan Persandian			Dinas Komunikasi dan Informatika
40)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	68	
22	Urusan Kebudayaan			Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
41)	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	
23	Urusan Perpustakaan			Dinas Arsip dan Perpustakaan
42)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan kearsipan	Indeks	78,01	
24	Urusan Kearsipan			Dinas Arsip dan Perpustakaan
43)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks	78,01	
25	Urusan Kelautan dan Perikanan			Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
44)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,12	
26	Urusan Pariwisata			Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
45)	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,44	
27	Urusan Pertanian			Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
46)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,68	
28	Urusan Perdagangan			Dinas Perdagangan Koperasi Usaha
47)	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	1,79	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
2	15	002	2.08	001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	80.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	2 orang	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	002	2.08	002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	24 laporan	10.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	24 laporan	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	002	2.08	003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	24 laporan	10.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	24 laporan	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	002	2.08	004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 laporan	60.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	2 laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	002	2.08	005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	24 laporan	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	24 laporan	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	002	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan bus sekolah	26.67 %	400.000.000,00			26.67 %	300,000,000					
2	15	002	2.09	001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 unit	400.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	8 unit	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	002	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek perkotaan yang aktif	18.75 %	10.000.000,00			18.75 %	10,000,000					
2	15	002	2.11	002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	10.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	3 dokumen	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	002	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek pedesaan aktif	62.5 %	10.000.000,00			62.5 %	10,000,000					
2	15	002	2.12	001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 dokumen	10.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	11 dokumen	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							13.021.539.000,00		17,896,668,000			
2	16	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5.116.665.590,00			100.00 %	7,892,412,000					
2	16	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	76.500.000,00			100 %	110,000,000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	16	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	66.500.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 laporan	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.203.316.137,00			100 %	3,830,000,000	
2	16	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.157.816.137,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27 Orang/bulan	3,690,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	24.900.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	15.500.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Laporan	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	1.020.270.453,00			100 %	2,500,000,000	
2	16	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10000 Orang	1.020.270.453,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	10000 Orang	2,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	185.999.000,00			100 %	380,000,000	
2	16	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	38.500.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 paket	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	16	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Paket	20.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 Laporan	39.750.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	87.749.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	134.250.000,00			100 %	454,912,000	
2	16	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	2 Unit	91.900.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	179,912,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	42.350.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	275,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	105.500.000,00			100 %	147,500,000	
2	16	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	12,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	71.500.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	115,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	390.830.000,00			100 %	470,000,000	
2	16	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	22 Unit	285.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	220,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	16	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	44.980.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	175,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	60.850.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	002			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat	100.00 %	3.981.850.000,00			100.00 %	1,902,084,000	
						Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	36.36 %				36.36 %		
2	16	002	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat	100 %	3.981.850.000,00			100 %	1,902,084,000	
2	16	002	2.01	001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	002	2.01	002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen 0 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen 0 Dokumen	85,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	002	2.01	004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	447.250.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	002	2.01	005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	346.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	002	2.01	006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	2.525.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	002	2.01	008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	002	2.01	010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	50 Orang	133.600.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	240,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	16	002	2.01	012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	402,084,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	003			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	72.22 % 75 % 62.75 %	3.923.023.410,00			72.22 % 75 % 62.75 %	8,102,172,000	
2	16	003	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	3.380.343.410,00			100 %	6,402,172,000	
2	16	003	2.01	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	69 Unit	3.380.343.410,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69 Unit	6,402,172,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	003	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik dan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik (layanan SPBE)	65 %	542.680.000,00			65 %	1,700,000,000	
2	16	003	2.02	003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah Yang Dikelola	1 Unit	34.124.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	600,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	003	2.02	007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	12 Unit	397.106.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Unit	600,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	003	2.02	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	77.950.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	003	2.02	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	33.500.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			105.395.000,00				296,429,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	20	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia	40.00 %	105.395.000,00			40.00 %	296,429,000	
2	20	002	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	75 %	105.395.000,00			75 %	296,429,000	
2	20	002	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik Sektoral	1 Dokumen	55.395.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	156,429,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	002	2.01	004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	140,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			89.380.000,00				247,024,000	
2	21	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	39.22 % 38.00 %	89.380.000,00			39.22 % 38.00 %	247,024,000	
2	21	002	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diamankan	30 %	89.380.000,00			30 %	247,024,000	
2	21	002	2.01	003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	59.380.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	167,024,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	002	2.01	004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 Perangkat Daerah	30.000.000,00	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Perangkat Daerah	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			20.710.800.286,00				22,922,237,000	
2	17	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	16.921.389.286,00			100.00 %	20,916,420,000	
2	17	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah terpenuhi tepat waktu	100 %	90.500.000,00			100 %	50,000,000	
2	17	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	85.000.000,00	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6 dokumen	40,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN